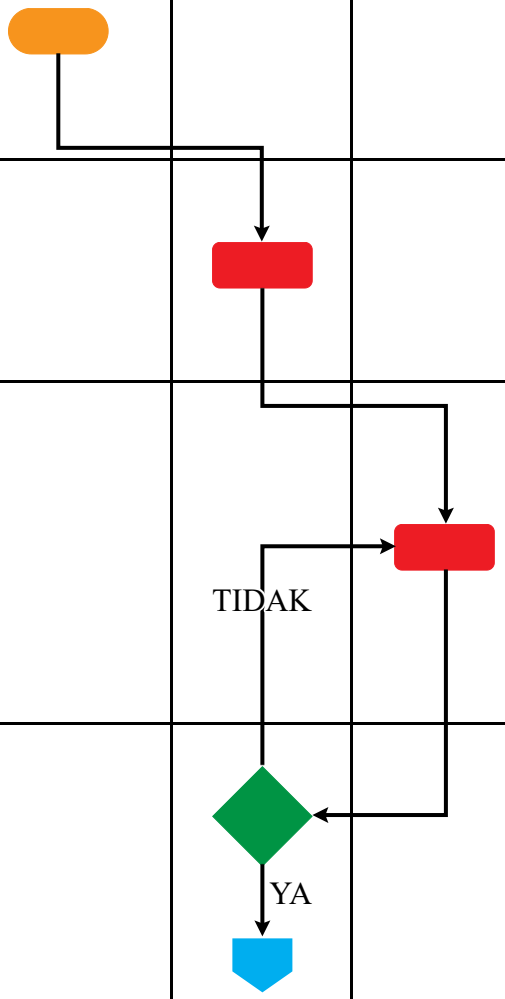
KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-165
	TANGGAL PEMBUATAN	9 OKTOBER 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	16 OKTOBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**   **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA MENTERI**

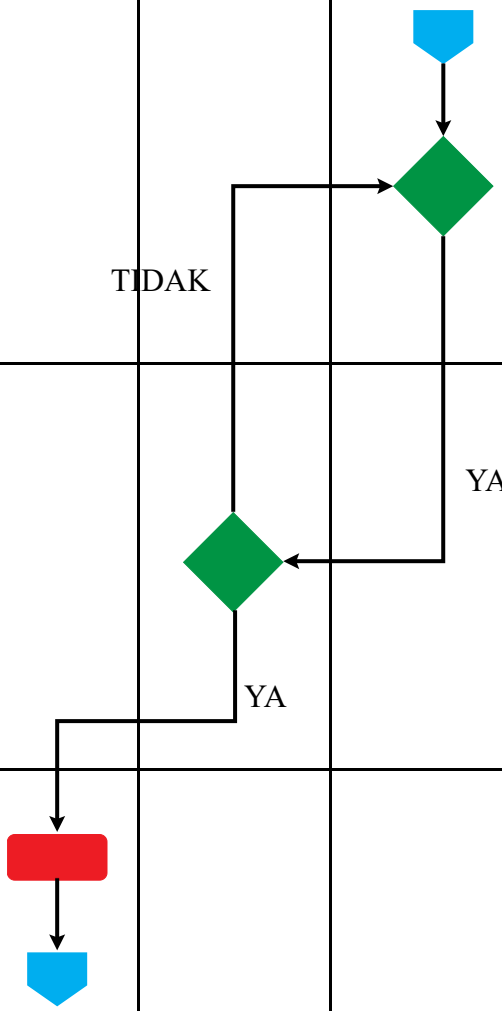
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum	1. Memahami bidang perencanaan 2. Memahami bidang anggaran
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Laporan Kinerja	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dijalankan, penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja dapat terhambat	Disimpan secara elektronik dalam aplikasi esop.kemenkum.go.id

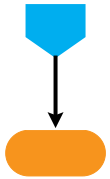
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA MENTERI

No	Kegiatan	MENTERI	SEKRETARIS JENDERAL	KARO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	KABAG PROGRAM DAN ANGGARAN	JF PERENCANA / PELAKSANA	ARSIPARIS	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk menyiapkan konsep perjanjian kinerja Menteri tahun berjalan							- Dokumen Renja - Dokumen Renstra - DIPA/RKA KL	10 Menit	Perintah/Disposisi Kepala Biro	Dokumen PK disampaikan paling lambat 1 bulan setelah DIPA disahkan.
2	Memerintahkan untuk menyusun konsep perjanjian kinerja Menteri tahun berjalan							- Perintah/Disposisi - Dokumen Renja - Dokumen Renstra - DIPA/RKA KL	10 Menit	Perintah/Disposisi Kepala Bagian	-
3	Menyusun konsep perjanjian Menteri untuk tahun berjalan dan melaporkan hasil penyusunan kepada kepala Bagian Program dan Anggaran							- Perintah/Disposisi - Dokumen Renja - Dokumen Renstra - DIPA/RKA KL	30 Menit	Konsep Perjanjian Kinerja Menteri dan konsep nota dinas pengantar penetapan	-
4	Memeriksa konsep perjanjian kinerja Menteri							Konsep Perjanjian Kinerja Menteri dan konsep nota dinas pengantar penetapan	10 Menit	Konsep Perjanjian Kinerja Menteri dan konsep nota dinas pengantar penetapan diperiksa Kepala Bagian	-



No	Kegiatan	MENTERI	SEKRETARIS JENDERAL	KARO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	KABAG PROGRAM DAN ANGGARAN	JF PERENCANA / PELAKSANA	ARSIPARIS	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Memeriksa dan memberikan paraf persetujuan konsep perjanjian kinerja Menteri							Konsep Perjanjian Kinerja Menteri dan konsep nota dinas pengantar penetapan yang telah diperiksa Kepala Bagian	10 Menit	-Konsep Perjanjian Kinerja Menteri dan konsep nota dinas pengantar penetapan diparaf dan diperiksa Kepala Biro - Nota dinas Pengantar penetapan Kepala Biro kepada Sekretaris Jenderal ditandatangani	-
6	Memeriksa dan memberikan paraf persetujuan konsep perjanjian kinerja Menteri							Konsep Perjanjian Kinerja Menteri dan konsep nota dinas pengantar penetapan yang telah diparaf dan diperiksa Kepala Biro	10 Menit	- Konsep perjanjian kinerja Menteri diparaf dan diperiksa Sekretaris Jenderal - Nota dinas Pengantar penetapan Sekjen kepada Menteri ditandatangani	-
7	Menandatangani konsep perjanjian kinerja Menteri							Konsep perjanjian kinerja Menteri yang telah diparaf dan diperiksa Sekretaris Jenderal	10 Menit	Konsep perjanjian kinerja Menteri ditandatangani	-



No	Kegiatan	MENTERI	SEKRETARIS JENDERAL	KARO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	KABAG PROGRAM DAN ANGGARAN	JF PERENCANA / PELAKSANA	ARSIPARIS	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Mengarsipkan dokumen perjanjian kinerja Menrteri.							Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri	10 Menit	Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri terarsipkan	-